

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adami Chazawi, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni.
- Agus Wibowo, dkk, 2022. *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Andi Hamzah, 2005. *Perbandingan Korupsi Di berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Mulyono, 2022. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Andi Sofyan, 2014. *Hukum Acara Pidana*. Makasar: Kencana
- Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edita Elda, 2021. *Korupsi Dalam Keadaan Tertentu*. Depok: Rajawali Pers.
- Elwi Danil, 2012. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Evi Hartanti, 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazel Feigenblatt, 2020. *Breaking The Silence Around Sextortion The Links Between Power, Sex and Corruption*. Transparency International.
- Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kemitraan, 2020. *Hukum Anti Korupsi*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Komisi Pemberantasan korupsi, 2014. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: KPK.

Lilik Mulyadi, 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T Alumni

Lilik Mulyadi, 2022. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan masalahnya*. Bandung: P.T Alumni.

Mardian arsjad, 2023. *Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Purbalingga: Diva Pustaka.

Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nassarudin Umar, 2019. *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.

Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian hukum*, Pasuruan: Qiara Media

Nurul Irfan, 2014. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH.

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Sekreteriat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024. *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Prespektif*. Jakarta: Sekreteriat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Suteki dan Galang Taufani, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok: Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), (LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak
Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta
Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas
Anggota Lembaga Tinggi Negara

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), LN No.76 Tahun
1981, TLN No. 3209

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LN No. 75
Tahun1999, TLN NO. 3851)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (LN No. 140 Tahun 1999, TLN NO.3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4355)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (LN No. 137 Tahun 2002, TLN NO. 4250)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN
No. 157 Tahun 2009, TLN NO. 5076)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (LN No. 197 Tahun 2019, TLN NO.6409)

C. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Bdg

Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010

D. Jurnal

Amalia Syauket, dkk, 2022. *Sextortion* Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 22 No. 3.

Angga Pratama, Elwi Danil dan Azmi Fendri, 2023, Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1.

Andi Hakim Lubis, dan Mhd. Hasbi, 2024, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*, vol. 1, No. 12.

Edita Elda, 2019, Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Lex Lata*. Vol 1, No 2.

Erlita Kresna, 2022. Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik, *Devience Jurnal Kriminologi*, Vol. 6, No. 1.

Fachrul Rozi, 2018, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1 No. 2.

Hardi Muhar Sungguh, 2023. Sanksi Terhadap Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam, *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol. 1 No. 2.

Hwian Christianto, 2010, Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana, *Pamator*, Vol 3, No 2.

Muhammad Alvito Dary, dkk, 2024. Pengaturan Hukum Mengenai Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Amandemen: *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.2.

Muwahid, 2017, Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif, *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01.

Nimerodi Gulo, dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, 2024, Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia, *Unes Law Review*.

Raymon Dart Pakpahan , Herlina Manullang, dan Roida Nababan, 2018, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA), *PATIK: Jurnal Hukum*, Vol.7, No.2.

Regita Pramesti, dkk, 2021, Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 2, No. 2.

E. Artikel dan Harian

Indonesia *Corruption Watch*, Divonis 8 Tahun Al-Amin Banding, <https://antikotupsi.id/id.article/divonis-8-tahun-al-amin-banding>. diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 13.00 WIB

Izza Akbarani, 2023. Korupsi Bernama “Sextortion” <https://transparansi.id/korupsi-bernama-sextortion/>, diakses pada tanggal 7 November 2023, pukul 9:50 WIB.

Komnas Perempuan, CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, [https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019#:~:text=CATAHU%202020%20mencatat%20431.471%20kasus,tahun%20sebelumnya%20\(406.178%20kasus\)](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019#:~:text=CATAHU%202020%20mencatat%20431.471%20kasus,tahun%20sebelumnya%20(406.178%20kasus)), diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 11.00 WIB.

KPK, Publikasi Data Statistik TPK Jenis Perkara, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB.

KPK, Yang Ditolak Yang Diterima Perihal Gratifikasi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240402-yang-ditolak-yang-diterima-perihal-gratifikasi>, diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 9.10 WIB.

M. Indra Furqon, Survei KPK: Hanya 13 Persen Laporkan Gratifikasi! <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Persepsi/20240806-survei-kpk->

[han_ya-13-per_sen-lapor-gratifikasi](#), diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 9.00 WIB.

Rusti Dian, 2023. Indonesia Peringkat Pertama Sextortion di Asia: Alarm Bahaya Korupsi dan Kekerasan Seksual, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/indonesia-peringkat-pertama-sextortion-di-asia-alarm-bahaya-korupsi-dan-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 15 November 2024, pukul 10.55 WIB.

F. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/gratifikasi>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 09.00 WIB.

